

# Konflik Antar Koalisi Partai Politik dan Implikasinya Terhadap Pemilihan Presiden Lebanon Tahun 2014

*(Conflict Between Political Parties Coalition and Its Implication on Lebanon Presidential Election in 2014)*

Yayan Al Fatah

Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember  
Jln. Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto, Jember 68121  
E-mail: [yafaalfa43@gmail.com](mailto:yafaalfa43@gmail.com)

## *Abstract*

*Lebanon is a democratic consociational system adherent in its government system, in which there is a power sharing in each sect according to Lebanese society. However, the implementation of consociational democracy in Lebanon failed causing a conflict between the political parties. Conflict of political parties in parliament have also been developed to form bipolarity of some Lebanese political parties into two opposing coalitions, the March 8 coalition (Coalition of pro-Syrian) and the March 14 coalition (coalition of anti-Syrian/pro-West). Each coalition has the proportion of almost the same number of seats in parliament, so that both sides can take advantage of the very rigid constitution by boycotting the presidential election process that causes the predetermined constitutional quorum unable to be met and failure in the election. Therefore, this study aimed to determine the conflict of political parties in Lebanon and that impacted the Lebanon Presidential election in 2014.*

*Keywords : consociational democracy, presidential election, conflict of political parties coalition, Lebanon*

## **Pendahuluan**

Situasi politik, ekonomi dan sosial-budaya Lebanon sangat dipengaruhi oleh perkembangan situasi regional Timur Tengah pada umumnya. Sistem politik Lebanon yang masih menganut sistem sektarian yang disebut sistem *Konfessionalism* mudah sekali dipengaruhi oleh situasi regional. Sistem *Konfessionalism* merupakan sistem yang membagi kekuatan politik berdasarkan kelompok agama, yang mana seorang presiden harus seorang Kristen Maronit, perdana

menterinya harus seorang Muslim Sunni, wakil Perdana Menteri seorang Kristen Ortodoks, dan ketua parlemen seorang Muslim Syiah (Hussain, 1989: 119). Pembagian ini merupakan hasil dari persetujuan tidak tertulis tahun 1934 antara Presiden Bechara Al-Khoury (Maronit) dan Perdana Menteri Riad al-Solh (Sunni) yang dikenal dengan istilah *al mithaq al-watani* atau *National Pact* (LoC, TT). Pembagian ini dilakukan melalui sistem konsensus jumlah masyarakat Lebanon yang telah dilaksanakan pada tahun 1932, sehingga

sampai saat ini sistem pemerintah di Lebanon masih mengacu konsensus pada tahun 1932 tanpa adanya konsensus baru.

Pembagian kekuasaannya menurut sistem konfensionalisme terdapat 128 kursi parlemen disusun sebagai berikut: 64 kursi untuk Muslim dan 64 lainnya untuk Kristen. Jatah kursi Kristen dibagi sebagai berikut: Maronit memperoleh 34 kursi, Kristen Ortodoks 14 kursi, Katolik 8 kursi, Ortodoks Armenia 5 kursi, Katolik Armenia 1 kursi, Protestan 1 kursi, Kristen Minoritas 1. Kemudian, jatah 64 kursi untuk Muslim dibagi sebagai berikut: Islam Sunni memperoleh 27 kursi, Islam Syiah 27 kursi, Druze 8 kursi dan Alawi 2 kursi (Kunkurat, 2013; 178). Tujuan pembagian kekuasaan ini untuk menyeimbangkan kondisi politik masyarakatnya yang sesuai dengan jumlah masyarakat mayoritas di Lebanon. Tetapi hal ini juga sangat rentan menimbulkan perpecahan sosial-politik mengingat setiap kelompok politik berafiliasi pada kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi situasi regional, seperti kelompok pro-Suriah, pro-Iran, maupun pro-Barat (AS dan Uni Eropa) (KBRI Beirut; TT).

Pada tahun 2014, Kondisi Lebanon sedang mengalami krisis politik berkepanjangan karena adanya kekosongan kepemimpinan presiden yang hingga saat ini masih belum menemukan penggantinya. Sehingga saat ini Lebanon masih belum memiliki Presiden yang tetap, kemudian tugas-tugas pemerintahan diambil alih sementara oleh Perdana Menteri Tammam Salam sampai dapat menentukan preside baru, sejalan dengan

konstitusi di Lebanon. Pemilihan presiden di Lebanon dipilih oleh para anggota parlemen sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam konstitusi Lebanon (Tim Redaksi, 2014a).

Anggota parlemen terdiri dari beberapa partai yang tergabung dalam suatu koalisi, yaitu koalisi 08 Maret dan koalisi 14 Maret. Kubu koalisi 08 Maret merupakan kubu yang mayoritas berideologi Muslim Syiah dan adanya dukungan oleh partai politik di Suriah yang dipimpin oleh anggota kelompok Hizbulloh dan Amal. Sedangkan koalisi 14 Maret (koalisi anti Suriah) adalah koalisi berideologi Sunni, Druze dan Kristen yang terbentuk saat Revolusi Cedar. Kubu ini dipimpin oleh Saad Hariri, putra dari seorang Perdana Menteri Rafiq Hariri. Salah satu tujuan dari kubu ini ialah mempertegas keberadaan Suriah dan kesepakatan perbatasan antar Suriah dan Lebanon (CNNI, 2014).

Selama proses pemilihan presiden Lebanon tahun 2014, parlemen selalu mengalami kegagalan karena kurangnya *quorum* yang telah ditentukan dalam konstitusi Lebanon. Ketidakhadiran anggota parlemen tersebut terjadi karena adanya perbedaan blok politik di parlemen yang sangat kental. Adapun blok politik yang dimaksud ialah, adanya dua kubu yang sangat berpengaruh dalam sistem politik di Lebanon, yaitu kubu koalisi 08 Maret dan kubu 14 Maret. Terbentuknya dua kubu inilah membuat partai politik Lebanon rentan terhadap konflik. Dua kubu koalisi di Lebanon ini memiliki pengaruh yang besar dalam pemilihan presiden Lebanon. Pada tiap kubu memiliki jumlah anggota parlemen yang hampir sama antara koalisi 08

Maret dan koalisi 14 Maret. Jadi apabila ada salah satu kubu ada yang melakukan *boikot* di parlemen, maka pemilihan presiden mengalami kegagalan kembali. Konflik koalisi partai politik dalam proses pemilihan Presiden juga diperburuk dengan adanya kepentingan dari negara pendukung masing-masing koalisi, yaitu koalisi 08 Maret yang beraliansi dengan Iran dan Suriah, sedangkan koalisi 14 Maret beraliansi dengan Amerika dan Arab Saudi. Oleh sebab itu, tulisan ini akan menganalisis tentang proses konflik antar koalisi partai politik yang berimplikasi pada pemilihan Presiden Lebanon tahun 2014.

### **Kerangka Pemikiran**

Tulisan ini menggunakan konsep konflik untuk menjelaskan konflik antar koalisi partai politik dalam pemilihan presiden di Lebanon. Soerjono Soekanto menyebutkan ada lima bentuk khusus konflik, yaitu konflik pribadi, politik, rasial, antar kelas sosial dan konflik yang bersifat internasional (Mariyati & Suryawati, 2014:72). Adapun bentuk konflik yang cocok dalam menjelaskan kondisi pemilihan presiden Lebanon adalah konflik politik dan konflik yang bersifat internasional. Konflik antar partai politik tersebut tidak hanya melibatkan kalangan internal saja, tetapi juga berkembang pada tingkat internasional karena masing-masing kubu memiliki kebijakan yang terkait dengan negara aliansinya, seperti koalisi 14 Maret dengan Amerika dan koalisi 08 Maret dengan Suriah.

Konsep kedua yang digunakan adalah konsep demokrasi konsosiasional sebagai bentuk spesifik

dari demokrasi konsesual yang dimukakan oleh Lipjhart (1976) dalam bukunya, *The Politics of Accomodation*, sebagai solusi bagi masyarakat yang sangat terpecah berdasarkan garis etnis, agama atau kultural. Gagasan representasi kelompok adalah kunci dalam pandangan Lipjhart tentang cara mencapai demokrasi, dan model demokrasi konsosiasional akan memberikan banyak ruang partisipasi kelompok dan suara untuk minoritas. Mekanisme dari demokrasi consociational merupakan mekanisme berbagi kekuasaan (*power sharing*) antara komunitas utama di dalam masyarakat, dengan tujuan mencapai stabilitas demokrasi yang bertahan lama, serta mencegah konflik antar komunitas di dalam masyarakat plural (Marijan, 2013:450). Konsep ini digunakan untuk menjelaskan sistem demokrasi yang diterapkan dalam sistem pemerintahan Lebanon.

Konsep ketiga yang digunakan adalah konsep pemilihan umum (Pemilu) yang merupakan suatu mekanisme yang paling penting dan umum bagi pelaksanaan hak politik suatu individu untuk berpartisipasi dalam pemerintahan (Budiarjo, 1981:1). Konsep ini digunakan untuk menjelaskan proses pemilihan presiden Lebanon. Tentunya dalam menjelaskan pemilu tidak terlepas dari sistem pemilu dan partai politik. Sistem pemilu Lebanon sangat kompleks yaitu campuran sistem distrik dengan proporsional sektarian. Daerah pemilihan didasarkan pada pembagian distrik, sedangkan pembagian kursinya didasarkan pada proporsi sekte-sekte yang telah diatur dalam

konstitusi Lebanon. Sedangkan partai politik Lebanon berdasarkan pada keterkaitan ideologi dan kelompok sekte. Namun, di dalam sistem perpolitikan Lebanon, Persaingan politik bukan antar partai-partai politik Lebanon, melainkan bersaing antar koalisi yang terdiri dari beberapa partai-partai Lebanon, yaitu Koalisi 08 Maret dan Koalisi 14 Maret.

Sedangkan konsep terakhir dalam karya tulis ilmiah ini adalah konsep polarisasi. Konsep polarisasi digunakan untuk menjelaskan pengaruh sistem-sistem pemilihan secara menyeluruh (Amal, 2012:75). Dalam sistem pemilihan Presiden Lebanon, partai-partai kecil menghadapi prospek yang kurang menguntungkan. Partai-partai kecil Lebanon untuk mempertahankan eksistensi partainya memutuskan untuk tidak membuang atau menyia-nyiakannya suaranya, sehingga memberikan suaranya pada salah satu dari dua partai mayoritas yang sedang bersaing. Suara dari partai kecil diberikan kepada partai yang memiliki jumlah suara mayoritas yang memiliki kesamaan ideologi/pandangan, yang akhirnya menggabungkan partai-partai kecil tersebut dengan partai mayoritas dan membuat suatu koalisi yang terdiri dari beberapa partai. Keadaan semacam ini tentu memperlemah usaha pengembangan partai-partai minoritas. Begitupula perkembangan partai-partai politik Lebanon yang tergabung dalam suatu koalisi untuk mempertahankan eksistensi partai politiknya.

## Hasil Penelitian

### Hubungan Hizbullah dengan Suriah

Sebagai partai politik atau kelompok militan Lebanon yang memiliki basis Syiah yang kuat di Lebanon, Hizbullah menguasai kawasan Lebanon Selatan dan secara konsisten menggunakan wilayah tersebut sebagai basis perlawanan terhadap Israel. Hizbullah juga mendapatkan dukungan dari Suriah yang sekaligus merupakan penghubung mereka dengan Iran, Kontrol Hizbullah atas wilayah Lebanon Selatan dimungkinkan karena lemahnya kemampuan pemerintah Lebanon yang masih kacau akibat perang saudara dan kuatnya intervensi Suriah yang mendorong penguatan Hizbullah. Tujuan dari Hizbullah sendiri, yaitu melakukan perlawanan terhadap Israel dan keterlibatan negara Barat di Timur Tengah, yang telah membuatnya menjadi suatu keamanan efektif untuk melaksanakan kebijakan luar negeri Iran sekaligus mendapatkan dukungan kelompok dari luar basis Syiah tersebut. Dalam melaksanakan programnya, Hizbullah memperoleh dukungan yang signifikan dari Iran dan Suriah, baik secara finansial maupun material sehingga kebijakannya selalu mengarah kepada kedua negara tersebut (Sullivan, 2014).

Interdependensi antara Hizbullah dan Suriah yang semakin kuat tersebut membuat Presiden Michael Sleiman melakukan dialog nasional yang dikenal dengan istilah *Baabda Declaration* (Tim Redaksi, 2015a). Dialog ini bertujuan untuk menjuhkan jarak dari konflik Suriah yang akan berdampak pada Lebanon dan mempertanyakan

kembali persenjataan yang dimiliki oleh Hizbullah untuk menjaga stabilitas Lebanon. Hal ini yang menyebabkan Hizbullah memboikot pemilihan presiden. Oleh karena itu, Hizbullah lebih memilih kevakuman pemerintahan daripada memilih, karena perannya akan dibatasi lagi presiden yang baru untuk menghindari keterlibatannya di Suriah.

Sebagai aliansi yang strategis bagi Hizbullah dalam menanamkan kepentingannya dengan Suriah, keberpihakan Hizbullah kepada rezim Suriah sangatlah kuat, mengingat Suriah memberi banyak dukungan yang signifikan terhadap Lebanon. Peran Negara Suriah disini untuk menjembantani Iran dalam melakukan penyaluran baik senjata maupun prajurit ke Lebanon untuk mendukung Hizbullah dalam melakukan aksinya melawan Israel di wilayah perbatasan Lebanon. Oleh karena itu, baik Lebanon maupun Iran tidak ingin kehilangan Suriah sebagai wilayah strategis untuk menyerang Israel, sehingga mereka turut membantu rezim Suriah untuk mengalahkan oposisinya (Israel dan negara barat). Pentingnya Suriah untuk Hizbullah, tidak hanya terbatas pada perannya sebagai saluran untuk dukungan finansial dan material, tetapi rezim Bashar Al-Assad (Presiden Suriah) telah memberikan tempat pelatihan bagi tentara Hizbullah dan tempat penyimpanan senjata. Oleh karena itu, meskipun Lebanon dalam keadaan kosong kepemimpinan, Hizbullah masih tetap membantu rezim Suriah. Hal ini juga tidak memungkinkan melakukan pemilihan presiden ketika Hizbullah masih turut terlibat dalam konflik Suriah.

## Proses Pemilihan Presiden di Lebanon tahun 2014-2015

Proses pemilihan presiden dilaksanakan dalam satu kali putaran apabila ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan pemilu dapat terpenuhi. Proses pertama jumlah anggota parlemen yang hadir dalam pemilu harus memenuhi jumlah *quorum* yang telah ditentukan oleh konstitusi, yaitu 2/3 atau 86 orang dari jumlah 128 anggota parlemen. Sehingga apabila *quorum* tidak terpenuhi, pemilu akan ditunda dan dilaksanakan kembali sesegera mungkin hingga di tiap pertemuan *quorum* harus dapat terpenuhi.

Sedangkan pada proses kedua setelah *quorum* sudah mencukupi sesuai yang telah ditentukan, calon presiden harus mendapatkan suara sebanyak 50%+1, yaitu 65 suara dari anggota parlemen. Apabila syarat pemilihan tersebut tidak dipenuhi, maka pemilihan akan ditunda hingga memenuhi jumlah yang telah ditentukan dan dilaksanakan segera mungkin pemilihan presiden selanjutnya yang telah ditentukan oleh parlemen. Menurut konstitusi Lebanon, yang berhak memilih seorang presiden hanya para anggota parlemen.

Selama proses pemilihan presiden berlangsung, para anggota parlemen sering mengalami kegagalan karena kurangnya *quorum* yang telah ditentukan. Ketidakhadiran anggota parlemen tersebut terjadi karena adanya perbedaan blok politik di parlemen yang sangat kental. Adapun blok politik yang dimaksud ialah, adanya dua kubu yang sangat berpengaruh dalam sistem politik di Lebanon, yaitu kubu koalisi 08 Maret

dan kubu 14 Maret. Dua kubu koalisi di Lebanon ini memiliki pengaruh yang besar dalam pemilihan presiden di Lebanon. Pada tiap kubu memiliki jumlah anggota parlemen yang hampir sama antara koalisi 08 Maret dan koalisi 14 Maret. Jadi, apabila ada salah satu kubu ada yang melakukan *boikot* di parlemen, maka pemilu akan mengalami kegagalan kembali.

Pada pemilihan presiden pertama kali dilaksanakan pada tanggal 22 April 2014, sejumlah blok politik di Lebanon sudah berhasil menyingkirkan kepentingan mereka dan bersaing secara sehat dalam pemilihan presiden. Tetapi, pada putaran selanjutnya hingga ke-30 kalinya persaingan menjadi sangat kacau karena adanya persaingan politik antara kedua blok yang sangat kental hingga melakukan boikot terhadap salah satu pihak, yaitu koalisi 08 Maret yang dipimpin oleh Hizbullah (Tim Redaksi: 2014b).

Pada putaran pertama pemilihan presiden dilaksanakan, Samir Geagea memenangkan 48 suara, yang mana diikuti 124 anggota parlemen yang hadir berpartisipasi dalam pemilihan. Calon kedua, Henri Helou, yang didukung oleh blok independen yang dipimpin oleh pemimpin Druze Walid Jumblatt, memenangkan 16 suara. Tujuh anggota parlemen batal memberikan suaranya dan satu suara juga diperoleh untuk pemimpin partai Phalangis Amin Gemayel, yang pernah menjabat menjadi seorang Presiden pada tahun 1982-1988. Tetapi banyak anggota parlemen yang masih belum memberikan suaranya kepada kandidat, khususnya Hizbullah dan sekutunya koalisi 08 Maret belum

menyatakan dukungan terhadap kandidat (Tim Redaksi, 2014c). Koalisi 08 Maret yang dipimpin Hizbullah masih enggan menentukan kandidat yang cocok karena melihat pada hasil pada putaran pertama, Samir Geagea yang memenangkan suara tertinggi dalam pemilihan. Sedangkan Koalisi 08 Maret menentang Samir Geagea karena memiliki *track record* yang buruk sebagai salah satu panglima perang yang paling ditakuti selama perang sipil dan pengecam keras terhadap kekuatan militer gerakan Muslim Syiah (Hizbullah) dalam keterlibatannya pada konflik di Suriah.

### **Kegagalan Pencapaian Kuorum dalam Pemilihan Presiden.**

Konstitusi merupakan suatu hal yang penting di suatu negara untuk mengatur negaranya agar lebih baik. Konstitusi digunakan sebagai acuan dalam kehidupan lembaga pemerintahan maupun masyarakat. Seperti halnya konstitusi Lebanon yang mengatur lembaga pemerintahan maupun masyarakat di Lebanon. Adapun salah satu contohnya, Konstitusi Lebanon mengatur jalannya pemilihan presiden yang saat ini sedang berlangsung dan masih belum menemukan presiden yang baru. Menurut konstitusi Lebanon, yang berhak memilih seorang presiden hanya para anggota parlemen. (RoL, 1995) Rakyat Lebanon tidak mempunyai hak untuk memilih seorang presiden. Sehingga rakyat hanya bisa menunggu keputusan yang diberikan oleh parlemen untuk menentukan presiden yang baru.

Masalah *quorum* sangat dipermasalahkan saat pemilihan presiden yang dilaksanakan pada

tahun 2014 dan masih belum menentukan presiden yang baru. Anggota parlemen harus memenuhi *quorum* yang telah ditentukan oleh konstitusi, yaitu, 2/3 dari jumlah keseluruhan anggota parlemen. Apabila *quorum* tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan, maka pemilihan tersebut akan ditunda kembali hingga *quorum* dapat terpenuhi. Sehingga hal ini memungkinkan para anggota parlemen terus melakukan pertemuan hingga *quorum* dapat tercapai dalam memilih presiden yang baru.

Memang masalah kuorum ini tidak dipermasalahkan pada pemilihan presiden sebelumnya yang pernah dilaksanakan di Lebanon, namun pada pemilihan presiden pada tahun 2014 ini mengalami perbedaan. Hal ini dikarenakan tingkat kontestasi pemilihan tidak dalam konteks partai politik, namun pada tingkat antar koalisi partai politik Lebanon. Oleh karena itu, *quorum* yang ditentukan dalam konstitusi sulit dapat terpenuhi, yaitu 2/3 dari jumlah anggota parlemen karena masing-masing koalisi memiliki jumlah kursi yang hampir sama di dalam parlemen. Sehingga, masalah *quorum* ini sangat dimanfaatkan bagi pihak oposisi untuk menggagalkan proses pemilihan presiden (CMEC, 2014).

Kegagalan pencapaian kuorum dalam proses pemilihan presiden tahun 2014, memungkinkan terjadinya amandemen dalam mengatur poses pemilihan Presiden Lebanon. Seperti halnya pendapat yang diusulkan oleh Michael Aoun seorang pemimpin partai politik *Free Patriotic*

*Movement* dan mantan komandan militer Lebanon dalam memecahkan solusi untuk menghentikan krisis kekosongan presiden di Lebanon.

Namun, Michael Aoun justru dituduh oleh oposisinya sebagai pelanggar konstitusi dan demokrasi dengan cara memboikot proses pemilihan Presiden dengan sekutunya, Hizbullah. Michael Aoun hanya menolak untuk mendukung presiden yang tidak menggalang dukungan dari masyarakat Lebanon. Sehingga yang diingankan oleh Michael Aoun dalam memecahkan masalah kevakuman presiden Lebanon adalah dengan cara mengadakan pemilihan presiden secara langsung yang dipilih oleh masyarakat Lebanon. Hal ini akan menjadi penyelesaian nasional yang disahkan oleh parlemen dalam mengatasi kekosongan Presiden. Michael Aoun juga menegaskan bahwa penyelesaian tidak dapat berlangsung tanpa mengakui pentingnya pemilihan presiden yang memiliki rasa hormat di kalangan masyarakat (Al-Monitor, 2014). Tetapi usulan Aoun tidaklah mudah diterapkan dalam mengamandemen proses pemilihan presiden, mengingat para anggota parlemen tetap mempertahankan egonya dalam mencapai kepentingannya masing-masing

### **Konflik antar Koalisi Partai Politik Lebanon dalam Proses Pemilihan Presiden**

Konflik politik yang terjadi di Lebanon, bukan lagi konflik antar partai politik melainkan antar dua kubu besar, yang terdiri dari beberapa partai-partai politik yang membentuk suatu koalisi. Dua kubu besar ini ialah koalisi 08 Maret (Koalisi pro-Suriah) dan koalisi 14 Maret (koalisi anti-

Suriah). Persaingan dalam pemilihan presiden menjadi terbatas, karena hanya dua kubu besar tersebut yang bersaing dalam proses pemilihan presiden. Dua kubu besar tersebut memiliki jumlah anggota parlemen yang hampir sama. Sehingga apabila terdapat salah satu pihak yang memboikot jalannya pemilihan, maka pemilihan tersebut gagal karena tidak mencukupi *quorum* yang telah ditentukan oleh konstitusi. Misalnya, pemboikotan yang dilakukan oleh koalisi 08 Maret selama pemilihan menyebabkan setiap pemilihan Presiden yang dilaksanakan mengalami kegagalan.

Alasan pemboikotan jalannya pemilihan yang dilakukan oleh koalisi 08 Maret untuk menghindari tuntutan akuntabilitas dalam mengekspos Hizbullah. Hizbullah dan sekutunya lebih memilih terjadinya kekosongan presiden daripada koalisi 08 Maret memiliki presiden yang aktif dalam menentang keterlibatan partai politik Lebanon dalam konflik Suriah, atau peran dan status sebagai perlawanan nasional. Dalam hal ini, Hizbullah mengacu terhadap pengalamannya dengan mantan presiden Suleiman. Presiden Suleiman meluncurkan sebuah proses dialog nasional yang dikenal sebagai Deklarasi Baabda, yang sangat mempertanyakan peran Hizbullah dalam konflik di luar perbatasan Lebanon. Bahkan terdapat suatu pernyataan yang diucapkan oleh salah satu calon yang potensial, yaitu Samir Geagea yang menyatakan keyakinannya bahwa pemilihan kepala negara (presiden) yang baru akan 'melemahkan' kedudukan Hizbullah di Lebanon, dalam sambutannya yang dipublikasikan di harian pan-

Arab Al-Hayat (Tim Redaksi, 2015b).

Adapun usaha para anggota parlemen dalam mengatasi kekosongan presiden tersebut, seperti melakukan negosiasi politik melalui lembaga-lembaga demokratis di antara pihak-pihak yang bertentangan maupun dialog bilateral antara partai-partai politik besar tidak membawakan hasil yang memuaskan (Tim Redaksi, 2014d).

Persaingan politik yang ada di Lebanon antara Syiah Hizbullah yang memimpin koalisi 8 Maret dan aliansi 14 Maret pimpinan Sunni mempunyai kepentingan yang berbeda. Aliansi 14 Maret pimpinan Sunni menentang pihak Lebanon agar tidak terlibat dalam konflik Suriah, Sedangkan Hizbullah berjuang secara terbuka atas nama rezim Suriah. Persaingan ini telah menghentikan jalannya pemilihan presiden, karena tidak memungkinkan untuk mengadakan pemilu karena ada beberapa pihak yang terlibat dalam konflik Suriah. Tetapi banyaknya dorongan dari masyarakat dan dukungan dari negara luar, seperti: negara-negara di Eropa, bahkan PBB menuntut agar para anggota parlemen segera melaksanakan pemilihan sesegera mungkin sesuai dengan konstitusi Lebanon. Namun demikian, tampaknya tidak memungkinkan kuorum yang diperlukan di parlemen akan tercapai selama Iran dan Arab Saudi mendukung masing-masing aliansinya. (SC Report UNIFIL, 2014). Oleh karena itu, hingga pada putaran pemilihan presiden ke-30 parlemen Lebanon masih belum dapat menentukan presiden yang tetap (Tim Redaksi, 2015c).

**Pihak-Pihak Terkait dalam Pelaksanaan Proses**

## Pemilihan Presiden

Persaingan antar kedua blok kubu besar dalam menentukan seorang presiden baru tidaklah mudah. Mengingat kedua blok kubu memiliki jumlah dukungan yang hampir sama. Persaingan sangatlah kuat, mengingat kedua kubu memiliki negara pendukung masing-masing. Adapun negara pendukung yang dimaksud ialah dua negara besar yang mempengaruhi situasi regional Timur Tengah pada umumnya, yaitu Arab Saudi dan Iran. Koalisi 08 Maret dengan basis Syiahnya mengarah ke Iran, sedangkan koalisi 14 Maret dengan basis Sunninya yang mengarah ke Saudi. Tidak hanya Arab Saudi, tetapi negara barat juga mendukung koalisi 14 Maret, seperti Amerika dan negara-negara Eropa.

Iran memberikan materi yang luas, keuangan, pelatihan, dan bantuan logistik kepada mitra regionalnya. Misalnya, Iran telah memasok Hizbullah dengan sebanyak \$ 200.000.000 setiap tahunnya. Setelah perang tahun 2006 antara Hizbullah melawan Israel, yang didukung oleh Iran dan Suriah, Hizbullah diberi pasokan senjata yang lebih canggih lagi (Sullivan, *Op.Cit*). Sedangkan Arab Saudi beserta negara asing, seperti AS dan negara-negara Eropa turut terlibat dalam memerdekakan Lebanon sebagai negara independen dari campur tangan Suriah dan mengakhiri status kependudukan Suriah di Lebanon. Sehingga semua tentara-tentara dan badan intelejen Suriah ditarik mundur kembali ke Suriah.

Selama proses pemilihan presiden yang berulang kali gagal di Lebanon, banyak negara luar

menyuarakan dukungannya agar Lebanon dapat menentukan presiden sesegera mungkin untuk melindungi Lebanon terhadap ancaman keamanan yang timbul dari gejolak regional. Adapun negara yang mendukung jalannya pemilu diantaranya ialah Arab Saudi dan Mesir yang meminta kepada para pemimpin politik (anggota parlemen) untuk bersatu dalam memilih presiden yang baru sesegera mungkin. Dewan Uni Eropa juga mengeluarkan peringatan keras kepada anggota parlemen Lebanon untuk mempercepat proses pemilihan presiden. Bahkan PBB juga mendesak para pemimpin Lebanon untuk mematuhi konstitusi negara, Perjanjian Thaif dan Pakta Nasional agar semua pihak dapat menempatkan kepentingan nasional di atas politik partisan demi stabilitas Lebanon (Tim Redaksi, 2015d).

Pada dasarnya, banyak partai politik di Lebanon secara signifikan didirikan sebagai milisi selama perang sipil Lebanon, termasuk Pasukan Lebanon, Amal, Hizbullah, dan Marada. Sedangkan partai politik lainnya, seperti Kataeb, Partai Sosial Nasional Suriah, dan Partai Sosialis Progresif, yang sangat jelas ideologinya dipengaruhi oleh ekstrim kiri atau Eropa yang tepatnya di pertengahan abad ke-20. Sedangkan dua partai politik Gerakan Masa Depan dan Gerakan Patriotik Bebas adalah produk dari generasi baru pasca perang sipil. Dua partai politik gerakan reformasi neo-liberal tersebut masing-masing dipimpin oleh tokoh-tokoh politik yang berpengaruh di Lebanon, yaitu Rafik Hariri dan Michel Auon. Partai Tashnak Armenia, bersama

dengan dua partai Armenia progresif kecil, adalah produk nasionalisme demokrasi liberal dan sosial di akhir abad ke-19 dan diimpor ke Lebanon setelah genosida Armenia. Sehingga tidak heran apabila banyak negara luar turut berpartisipasi dalam mempengaruhi perpolitikan di Lebanon.

Kekosongan seorang Presiden yang terjadi di Lebanon membuat sistem pemerintahan Lebanon tidak bisa berjalan stabil. Selama kekosongan Presiden, keamanan di Lebanon sangatlah kacau. Lebanon telah berurusan dengan ancaman teroris baru dan populasi jumlah pengungsi Suriah yang semakin meningkat. Akibat konflik di Suriah hampir 1,2 juta pengungsi berada di Lebanon. Hal ini berpengaruh pada perekonomian di Lebanon yang semakin menurun dan meningkatkan angka pengangguran karena dampak masuknya pengungsi Suriah. Hal inilah yang menjadi faktor pendorong dan perlu dipertimbangkan lagi pemilihan presiden agar segera diselesaikan karena berdampak besar pada stabilitas pemerintahan Lebanon. (Tim Redaksi, T T).

### KESIMPULAN

Sebagai penganut sistem demokrasi konsosiasional, Lebanon ternyata harus menghadapi konflik antar koalisi partai politik yang cukup sengit. Berdasarkan penelitian ini dapat dikatakan bahwa penerapan sistem demokrasi konsosional di Lebanon, pada akhirnya membuat kegagalan bagi sistem pemerintahan di Lebanon. Hal itu dikarenakan perubahan demografi jumlah populasi masyarakat Lebanon

secara signifikan, sehingga menimbulkan protes tentang adanya status sosial yang telah ditetapkan dalam konstitusi Lebanon sehingga sangat rentan terjadinya konflik antar komunitas. Padahal tujuan pembagian kekuasaan di tiap sekte untuk mencapai stabilitas demokrasi yang bertahan lama, serta mencegah konflik antar komunitas di dalam masyarakat plural (heterogen), justru membuat keadaan di Lebanon semakin kacau dengan adanya konflik antar komunitas berdasarkan sekte.

Melalui penelitian ini terdapat fakta atau bukti bahwa konflik antar koalisi partai politik Lebanon di parlemen juga memiliki dimensi internasional karena terkait secara ideologi dan politik dengan negara aliansinya. Konflik politik di parlemen yang awalnya konflik antar partai-partai politik Lebanon telah berkembang membentuk suatu bipolaritas yang menjadi dua kubu besar yang saling berlawanan setelah pasca terjadinya Revolusi Cedar, yaitu koalisi 08 Maret yang pro-Suriah dan koalisi 14 Maret yang anti-Suriah/pro Barat.

Masing-masing koalisi memiliki proporsi jumlah kursi yang hampir sama dalam parlemen. Jumlah kursi parlemen yang hampir sama tersebut, dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dalam pemilihan presiden dengan cara memboikot proses pemilihan presiden yang menyebabkan *quorum* yang telah ditentukan konstitusi tidak dapat terpenuhi dan menyebabkan kegagalan pemilihan presiden.

### Daftar Pustaka

## Buku

Amal, Ichlasul. 2012. *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Budiarjo, Miriam. 1981. *Partisipasi dan Partai Politik sebagai Bunga Rampai*. Jakarta: PT Gramedia.

Hussain, Muhammad Amir. 1989. *Perang Saudara di Lebanon: Latar Belakang dan Masalah*. Jakarta: Universitas Nasional.

Kunkurat. 2013. *Titik Sentuh antara Partai Politik, Pemilu dan Demokrasi*. Bandung: Prosidi diskusi bulanan lab. HI 2012-2013 FISIP UNPAS.

Ishiyama, John T dan Breuning, Marijike. 2013. *Ilmu Politik dalam Paradigma Abad Kedua Puluh Satu* diterjemahkan oleh Kacung Marijan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Maryati, Kun dan Suryawati, Juju. 2014. *Sosiologi: Kelompok Pemintan Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Esis Erlangga.

## Peraturan Perundang-undangan

Republic of Lebanon (RoL). 1995. *The Lebanese Constitution*. Dikutip dari: <http://www.presidency.gov.lb/-English/LebaneseSystem/Documents/-Lebanese%20Constitution.pdf> [10 Februari 2015].

## Internet

*e-Journal Ilmu Hubungan Internasional*

Al-Monitor. 2014. *Lebanon Aoun Speaks Out Over Parliamentar Extension Politics*. Diakses dari: <http://www.al-monitor.com/pulse/politics/2014/11/lebanon-aoun-speaks-out-over-parliamentar-extension-politics.html#> [08 Juni 2015].

Carnegie Middle East Center (CMEC). 2015. *Lebanese President Election*. Diakses dari: <http://carnegie-mec.org/publications/?fa=58965> [08 September 2015].

CNN Indonesia (CNNI). 2014. *Afiliasi partai dan Militan di Libanon*. Diakses dari: <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20141029160804-120-875-/afiliasi-partai-dan-militan-di-libanon/> [3 Desember 2014].

KBRI Beirut. Tanpa Tahun (TT). *Profil Negara dan Kerjasama*. Diakses dari: <http://www.kemlu.go.id/beirut/Pages/CountryProfile.aspx?IDP=4&l=id> [07 Desember 2014].

Library of Congress (LoC). Tanpa Tahun (TT). *Presidential Election and the Conflicting Constitutional Interpretations*. Diakses dari: <http://www.loc.gov/law/help/lebanon-election.php> [30 April 2015].

Security Council (SC) Report United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). 2014. *Middle East Lebanon*. Dikutip dari: [http://www.security-councilreport.org/monthly-forecast/2014-07/lebanon\\_8.php](http://www.security-councilreport.org/monthly-forecast/2014-07/lebanon_8.php) [25 April 2015].

- Sullivan, Marissa. 2014. *HEZBULLOH IN SYRIA*. Middle East Security Report 19. ISW (Institute for Study War). Diakses dari: [http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Hezbollah\\_Sullivan\\_FIN\\_AL.pdf](http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Hezbollah_Sullivan_FIN_AL.pdf) [21 Maret 2015].
- Tim Redaksi. Tanpa Tahun (TT). *Thousands Rally in Beirut Over Politician's Presidential Election Call*. Diakses dari <http://www.reuters.com/article/2015/09/04/us-lebanon-politics-idUSKCN0R425M-20150904> [04 September 2015].
- Tim Redaksi. 2014a. *Parlemen Lebanon Gagal Pilih Presiden*. Diakses dari: <http://www.tempo.co/read/news/2014/06/10/115583968/Parlemen-Lebanon-Gagal-Memilih-Presiden> [06 November 2014].
- Tim Redaksi. 2014b. *Lebanon postpones presidential vote to Jan. 7*. Diakses dari: <http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2014/Dec-10/280555-lebanon-postpones-presidential-vote-to-jan-7.ashx> [12 Desember 2014].
- Tim Redaksi. 2014c. *Lebanon : Security Council Urges Speedy Election Amid Presidential Vacuum*. Diakses dari: <http://www.un.org/apps/news/-story.asp?NewsID=47-925#.VhcDZeyqqko> [08 September 2015].
- Tim Redaksi. 2015a. *Sleiman Says to Work on Resuming National Dialogue*. Diakses dari: <http://dailystar.com.lb/News/Politics/2015/Jul-21/224467-sleiman-says-to-work-on-resuming-national-dialogue.ashx> [22 Maret 2015].
- Tim Redaksi. 2015b. *Election of President to Weaken Hezbollah, Geagea*. Diakses dari: <http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2015/Jul-22/307745-election-of-president-to-weaken-hezbollah-geagea.ashx> [08 September 2015].
- Tim Redaksi. 2014c. *Lebanon Nominate President 2014*. Diakses dari: <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/04/lebanon-nominate-president-201442365922519100.html> [28 Juni 2015].
- Tim Redaksi. 2015d. *Council Pushes for Lebanon to Elect a President*. Diakses dari: <http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2015/Jun-23/303357-eu-council-pushes-for-lebanon-to-elect-a-president.ashx> [29 Juli 2015].
- Tim Redaksi. 2015d. *Political Vacuum Undermines Lebanon's Ability to Tackle Many Challenges- Security Council*. Diakses dari: <http://www.un.org/apps/news/-story.asp?NewsID=50-374#.VhcDxeyqqko> [28 September 2015].